

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Kabupaten Maros)

RECKY REINHARD REYNANTO



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Kabupaten Maros)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

RECKY REINHARD REYNANTO

A031191175



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Kabupaten Maros)

disusun dan diajukan oleh:

RECKY REINHARD REYNANTO
A031191175

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 31 Juli 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., AK., M.Si, CA., CRA., CRP
NIP 19640609 199203 1 003

Pembimbing II



Afdal, S.E., M.Sc., Dec., AK
NIP 19880901 201504 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI



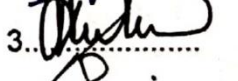
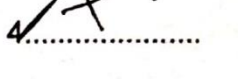
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

disusun dan diajukan oleh

RECKY REINHARD REYNANTO
A031191175

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 24 Agustus 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., AK., M.Si, CA., CRA., CRP	Ketua	1. 
2	Afdal, S.E., M.Sc., Dec., AK	Sekretaris	2. 
3	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc, CA	Anggota	3. 
4	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Recky Reinhard Reynanto

NIM : A031191175

Departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1 (satu)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 September 2023

Yang membuat pernyataan



Recky Reinhard Reynanto

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Tritunggal Mahakudus Bapa, Putera, dan Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua peneliti Marinus Samperuru dan Anastasia Imelda, adik Revhy Reskita Revayani, Aquila Mariel Edlyn, Alike Kaila Fiorenza, dan Chilla Maureen Quintina, serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan doa selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., AK., M.Si, CA., CRA., CRP selaku Pembimbing I dan Bapak Afdal, S.E., M.Sc., Dec., AK selaku Pembimbing II atas waktu dan ketulusannya dalam membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA selaku penguji peneliti, dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM selaku penasihat akademik sekaligus penguji peneliti yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA., selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu/Bapak dosen, pegawai, dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan, pengalaman serta

bantuan yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

6. Rini Ana Boro yang selalu menemani dan mendukung peneliti dalam setiap tahapan penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KMK-FEB UH), teman-teman *My Trip My Funny Adventure*, teman-teman *Trauzer Klasse* dan seluruh teman lainnya atas doa, dukungan, dan pengalaman yang sungguh menyenangkan.
8. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA FEB-UH), teman-teman *19nite*, dan teman-teman Eni sebagai tempat bagi peneliti untuk mengembangkan diri dan berorganisasi
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan di Universitas Hasanuddin terlebih dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dan pengembangan kapasitas penelitian di masa yang akan datang.

Makassar, 20 September 2023



Recky Reinhard Reynanto

ABSTRAK

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maros)

Recky Reinhard Reynanto
Arifuddin
Afdal

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan *good government governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BKAD Kabupaten Maros. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BKAD Kabupaten Maros yang berjumlah 62 orang. Data diperoleh dari data primer yaitu melalui penyebaran kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas), Uji Analisis Regresi Linear Berganda, dan Uji Hipotesis (Uji *Adjusted R²*, Uji-t, Uji-F (*Goodness of fit*)). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BKAD Kabupaten Maros, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BKAD Kabupaten Maros.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Good Government Governance*, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The effect of Government Internal Control System and Good Government Governance on the Quality of Local Government Financial Statements (Case Study at the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of Maros Regency)

Recky Reinhard Reynanto
Arifuddin
Afdal

The research aims to analyze and determine the influence of Government Internal Control System and Good Government Governance on the Quality of Local Government Financial Statements at the BKAD of Maros Regency. The sample in this study was 62 employees of the State Civil Apparatus (ASN) BKAD Maros Regency. Data is obtained from primary data, namely through the distribution of questionnaires. The data analysis techniques used in this study are Descriptive Statistics, Data Quality Test (Validity Test and Reliability Test), Classical Assumption Test (Normality Test, Heteroscedasticity Test, Multicollinearity Test), Multiple Linear Regression Analysis Test, and Hypothesis Test (Adjusted R² Test, t-Test, F-Test (Goodness of fit)). The results of this study show that the government's internal control system has a significant effect on the quality of the financial statements of the Maros Regency BKAD, and the results show that good government governance does not have a significant effect on the quality of the Maros Regency BKAD's financial reporting.

Keywords: *Government Intern Control System, Good Government Governance, Quality of Local Government Financial Statements*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Penelitian	27
2.4 Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.2 Tempat dan Waktu	31
3.3 Populasi dan Sampel.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Variabel Penelitian.....	33
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian	34
3.7 Teknik Pengumpulan Data	35
3.8 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros 44	
4.1.2 Visi Misi BKAD Kabupaten Maros.....	44

4.1.3	Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Maros	45
4.1.4	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab BKAD Kabupaten Maros 46	
4.2	Deskriptif Data Umum	50
4.2.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	52
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	53
4.4	Uji Kualitas Data.....	58
4.4.1	Uji Validitas	58
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	60
4.5	Hasil Analisis Data.....	61
4.5.1	Uji Asumsi Klasik.....	61
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda.....	66
4.7	Uji Hipotesis	67
4.7.1	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	67
4.7.2	Uji Statistik F (<i>Goodness of Fit Test</i>)	68
4.7.3	Uji Statistik t (<i>t-test</i>)	70
4.8	Pembahasan	71
4.8.1	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	71
4.8.2	Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....		78
LAMPIRAN		81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Hasil Opini BPK atas LKPD Kabupaten Maros	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Operasional Variabel	34
Tabel 3. 2 Skala Pengukuran <i>Likert</i>	36
Tabel 4. 1 Deskripsi Penyebaran Kuesioner.....	50
Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	51
Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	52
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	53
Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	54
Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel <i>Good Government Governance</i>	56
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah. 57	
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	60
Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Normalitas Metode <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	63
Tabel 4. 12 Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas	65
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	66
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	68
Tabel 4. 15 Hasil Uji Statistik F (<i>Goodnes of Fit Test</i>)	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah	45
Gambar 4. 2 Grafik Histogram	62
Gambar 4. 3 Grafik <i>Normal P-P Plot</i>	62
Gambar 4. 4 Grafik <i>Scatterplot</i>	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan keberhasilan dalam menjalankan tugas pembangunan negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pada lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah, akuntabilitas lembaga terus menjadi isu krusial yang dikawal oleh masyarakat. Seiring dengan tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik memberikan implikasi terhadap manajemen pemerintahan khususnya dalam sektor publik untuk meningkatkan kualitas informasi yang lebih baik, salah satunya penyajian laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang baik memperlihatkan penyelenggaraan pemerintahan yang mumpuni. Pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pemerintah kedepannya dapat memanfaatkan laporan keuangan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 telah menyebutkan kriteria atau unsur-unsur pembentuk kualitas informasi laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. LKPD wajib memenuhi keempat karakteristik agar mampu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Informasi yang berada dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian laporan keuangan dengan indikator yang ditetapkan undang-undang berakibat pada

kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Mulyati et al., 2019).

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Mulyati et al., 2019). Otonomi daerah membuka peluang untuk tiap-tiap daerah dalam mengelola dan menjalankan urusan pemerintahan daerah secara mandiri tetapi berlandaskan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan otonomi daerah juga berarti memberikan kesempatan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang mendorong tercapainya *good government governance* (Mulyati et al., 2019).

Pemberlakuan otonomi daerah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Pemberlakuan ketiga undang-undang ini mengatur pengelolaan keuangan negara yang berlangsung lebih demokratis. Undang-Undang ini juga mengatur pemberlakuan sanksi terhadap para pengelola keuangan negara. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah dituntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, laporan

keuangan pemerintah daerah akan diaudit oleh BPK RI selaku auditor eksternal pemerintah daerah di Indonesia. Kualitas LKPD juga ditentukan oleh penilaian yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya dalam bentuk opini auditor eksternal BPK. Opini BPK memiliki empat tingkatan, yakni Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

UU No. 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengungkapkan penetapan WTP oleh BPK mengartikan laporan keuangan suatu entitas pemerintahan dinyatakan secara wajar dan berkualitas. Dalam siaran pers BPK RI di tahun 2021 diungkapkan bahwa terjadi peningkatan pemerolehan opini WTP yang diraih oleh LKPD selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, terdapat 379 LKPD atau 70% dari keseluruhan LKPD yang memperoleh opini WTP. Di tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi 486 LKPD atau 90% dari keseluruhan LKPD yang meraih opini WTP BPK RI.

BPK RI menilai 541 LKPD 2020 dari 541 pemerintah daerah pada semester I tahun 2021. Menurut level pemerintahan, 97% laporan keuangan pemerintah provinsi di 33 provinsi mendapatkan opini WTP dari 34 provinsi keseluruhan yang ada. Sedangkan, laporan keuangan pemerintah kabupaten mendapatkan persentase 88% atau terdapat 365 dari 415 laporan keuangan pemerintah kabupaten yang meraih opini WTP. Di sisi lain, terdapat 95% atau setara dengan 88 dari 93 laporan keuangan pemerintah kota yang meraih opini WTP. Melalui data ini, sasaran reformasi kegiatan prioritas untuk sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan di RPJMN

2020–2024, mencatat ketercapaian 91% untuk laporan keuangan pemerintah provinsi, 77% laporan keuangan pemerintah kabupaten dan 91% pemerintah kota di tahun 2020 (BPK RI, 2021).

Salah satu daerah yang kerap kali menerima opini WTP oleh BPK RI adalah Kabupaten Maros. Maros, kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan, merupakan daerah yang memperoleh opini WTP BPK sebanyak 10 kali. Opini WTP yang diterima oleh Maros pertama kali terjadi pada tahun 2004. Di tahun 2013 hingga 2021, Maros mengukuhkan posisinya dalam mencapai Opini WTP sembilan kali berturut-turut (Umar, 2022). Berikut ini merupakan hasil opini WTP Kabupaten Maros periode 2013 – 2021 yang dimuat dalam Fajar Sulsel,

Tabel 1. 1 Hasil Opini BPK atas LKPD Kabupaten Maros
Tahun 2013 - 2021

Tahun	Hasil Opini BPK RI
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP

Sumber: sulsel.fajar.co.id, diakses 16 Maret 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Maros telah menerima WTP selama sembilan tahun berturut-turut. Meskipun

telah mendapatkan penghargaan atas capaian WTP yang telah diterima, Kabupaten Maros tetap harus berbenah. Meskipun telah meraih opini WTP, Kabupaten Maros masih harus berbenah karena terdapat catatan rekomendasi yang memuat kekeliruan penganggaran belanja barang dan jasa, belanja modal, dan nilai penjualan aset yang harus diperhatikan (Umar, 2022). Predikat opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Maros menandakan bahwa terciptanya komitmen pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Tercapainya opini WTP untuk Kabupaten Maros berfungsi untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan pada manajemen pemerintah daerah.

Penelitian (Putra, 2022) pada OPD di Pemerintah Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui pengaruh SPIP terhadap LKPD. Hasil penelitian (Putra, 2022) mengungkapkan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD OPD di Kota Pekanbaru. Kualitas laporan keuangan akan semakin baik jika penerapan SPIP semakin baik. Di sisi lain, penelitian yang dilaksanakan (Ningrum, 2019) bertujuan mengetahui pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD pada OPD Kota dan Kabupaten Magelang. Hasil penelitian (Ningrum, 2019) mengungkapkan bahwa penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Penelitian (Tullah et al., 2016) pada Pemerintah Daerah Provinsi di Jawa Barat dan Banten yang bertujuan melihat pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD. Hasil Penelitian (Tullah et al., 2016) mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Di sisi lain, penelitian (Tullah et al., 2016) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good government governance* terhadap kualitas LKPD Pemerintah Daerah Provinsi di Jawa Barat dan Banten. Melalui penelitian ini diungkapkan bahwa *good government governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas LKPD yang dikeluarkan instansi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sementara itu, penelitian (Masitoh et al., 2020) untuk mengetahui pengaruh penerapan *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hasil penelitian (Masitoh et al., 2020) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Melalui penelitian – penelitian tersebut, terdapat beberapa aspek yang memengaruhi kualitas LKPD seperti penerapan SPIP dan *good government governance*. Hasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD. Tetapi, juga terdapat penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD. Jadi, dari beberapa penelitian terkait pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD masih menunjukkan hasil yang inkonsistensi.

Kualitas LKPD dipengaruhi oleh penerapan SPIP. SPIP termuat di dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mendefinisikan SPIP sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Putra, 2022). Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, selain penerapan SPIP, *good government governance* merupakan elemen lain yang memengaruhi pada kualitas LKPD. Penjagaan sinergi interaksi antar domain di dalamnya, memiliki mekanisme kontrol yang dapat dipercaya, dan memiliki bentuk pemerintahan yang akuntabel kepada rakyatnya, maka *good government governance* adalah bentuk pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien (Zeyn, 2011). *Good government governance* dinilai dengan perwujudan tata kelola pemerintahan berlandaskan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maros terkait dengan pengaruh penerapan SPIP dan *good government governance* terhadap kualitas LKPD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang ada, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah penerapan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BKAD Kabupaten Maros?

2. Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BKAD Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini, sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis terkait pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BKAD Kabupaten Maros.
2. Mengetahui dan menganalisis terkait pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BKAD Kabupaten Maros.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, pemerintah, peneliti sendiri, maupun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menyediakan bukti empiris atas teori *Stewardship* terkait dalam menjelaskan pengaruh penerapan SPIP dan *good government governance* terhadap kualitas LKPD.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berikut ini merupakan kegunaan praktis dari penelitian ini:

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat sebagai evaluasi terkait kualitas

laporan keuangan pemerintahan dan sebagai rujukan dalam proses pengambilan keputusan terkait penerapan SPIP dan *good government governance*.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu menjadi media dalam memperluas ilmu pengetahuan terkait dengan pengaruh penerapan SPIP dan *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam mengembangkan penelitian yang serupa selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menjelaskan terkait garis besar isi dari suatu penelitian agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini memberikan penjelasan terkait apa yang diteliti, untuk apa diteliti, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Maka dari itu, bab pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini, terdapat peninjauan pustaka mengenai teori-teori terkait dan mendukung penelitian ini, maka dari itu bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini berisikan rancangan penelitian, definisi operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan Penelitian. Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan hasil interpretasi pengujian hipotesis.

Bab V: Penutup. Bab ini adalah bagian akhir penelitian yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, Saran untuk penelitian selanjutnya, dan keterbatasan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Donaldson & Davis (1989) mempublikasikan teori *stewardship* menjadi teori berbasis pada tingkah laku dan premis. Teori *Stewardship* mengilustrasikan kondisi para manajer yang termotivasi oleh kepentingan organisasi. Basis psikologi dan sosiologi digunakan pada penelitian ini yang dikonstruksikan bagi para eksekutif atau *steward*, agar termotivasi melakukan tindakan seperti yang diinginkan oleh *principals*. Sementara itu, *steward* mempunyai sikap loyalitas terhadap organisasi karena *steward* berupaya mencapai tujuan organisasi (Bahri, 2017).

Menurut teori *stewardship*, masyarakat berperan sebagai pelaku dan berlaku seperti pemilik sumber daya tersebut, sedangkan pemerintah berperan sebagai pelayan dan penyelenggara sumber daya tersebut. Sebagai pelayan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan masyarakat (Indrayani, 2020). Beberapa penelitian akuntansi organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan dan nirlaba telah mengaplikasikan teori *stewardship* (Jefri, 2018).

Teori ini dapat digunakan dalam melihat perilaku pengelola keuangan daerah terkait motivasinya dalam bertindak untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat (Asnida et al., 2018). Pada penyusunan laporan keuangan pemerintah, pemerintah (*steward*) wajib memberikan informasi yang berguna

untuk pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah (*principal*). Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini berfungsi dalam menguraikan keberadaan pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang terpercaya, yang mampu memwadahi aspirasi publik, dan menyediakan layanan publik yang baik serta dapat mempertanggung jawabkan anggaran yang telah dipercayakan, agar tujuan ekonomi dapat terlaksana dan tercapainya kesejahteraan rakyat secara optimal.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah adalah:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen, dan personal lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam pencapaian tujuan perusahaan baik terkait kegiatan operasional, pelaporan, maupun kepatuhan (Fajar & Rusmana, 2018). Dalam penelitian Mahmudi dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses penyatuan dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen

(eksekutif) dan jajarannya dalam rangka memberikan jaminan atau keyakinan atas ketercapaian suatu tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, serta pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku (Hastuti, 2017).

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP memiliki tujuan untuk memberikan jaminan mumpuni atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah negara secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

2.1.2.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, terdapat indikator SPIP yakni,

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus membangun dan mempertahankan lingkungan yang menciptakan perilaku positif dan mendorong pada pengendalian intern dan manajemen yang baik.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian internal wajib membuat penilaian atas risiko yang ditemui oleh unit organisasi baik dari luar atau dari dalam. Pengawasan penilaian risiko dimulai sejak penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang secara jelas dan konsisten baik pada level instansi atau pada level kegiatan. Adapun, instansi pemerintah

menganalisis peluang risiko yang dapat terjadi dan menghambat proses tercapainya suatu tujuan baik risiko yang muncul dari dalam ataupun luar instansi secara efisien dan efektif.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat mendukung pelaksanaan arahan pimpinan instansi pemerintah agar peluang risiko yang telah teridentifikasi pada masa penilaian risiko dapat diminimalisir.

4. Informasi dan Komunikasi

Instansi Pemerintah wajib mempunyai saluran informasi yang relevan dan andal baik informasi yang mencakup keuangan atau non-keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi yang ada wajib dicatat dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan bagi setiap pegawai instansi yang memerlukannya dalam bentuk serta kerangka waktu yang bersangkutan dalam pelaksanaan proses pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan cara untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memberikan kepastian bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan pada SPIP diselenggarakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain terkait dalam pelaksanaan tugas. Disisi lain, evaluasi terpisah mencakup penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektifitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reuiu yang ditetapkan.

2.1.3 Good Government Governance

2.1.3.1 Pengertian Good Governance

Good governance merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *World Bank* dalam Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa *good governance* adalah pelaksanaan manajemen pembangunan yang kokoh dan penuh tanggung jawab yang berjalan sesuai asas demokrasi dan pasar yang efisien, dan kemampuan menghindari kesalahan dalam pengalokasian dan investasi, serta mencegah terjadinya korupsi secara politik atau administratif. *Good governance* juga menyelenggarakan ketaatan anggaran dan pembentukan *legal* dan *political framework* agar terciptanya pertumbuhan kegiatan usaha. Sedangkan, *United Nation Development Programme* (UNDP) mengungkapkan *good governance* merupakan penerapan kewenangan politik, ekonomi, serta

administratif pada semua tingkat dalam pengaturan urusan suatu negara (Mardiasmo, 2009).

Pada hakikatnya, *good governance* merupakan pengelolaan pemerintah yang mempunyai kapasitas dalam mengurus sumber daya suatu entitas dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien demi kepentingan umum. Hal ini merupakan langkah untuk memperbaiki kinerja pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Pengertian Good Government Governance

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 pasal 2 mendefinisikan *good government governance* adalah:

“Kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip - prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”

Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (2000) menyebutkan bahwa *Good Government Governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta mampu mempertahankan sinergitas interaksi yang bersifat membangun diantara perangkat-perangkat negara, sektor swasta, dan masyarakat (Ferra Pratiwi Zai, S et al., 2020).

Good government governance (GGG) biasa disebut sebagai suatu pemerintahan yang baik. Berbeda dari *good*

governance, GGG lebih berfokus pada pemerintah (sektor publik) yang bekerja sama dalam pengelolaan suatu negara dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan kehendak atau intensi rakyat. GGG menyampingkan kepentingan pribadi yang bisa merugikan masyarakat luas (Asmoro & Setianingsih, 2019).

2.1.3.3 Indikator *Good Government Governance*

Menurut Mardiasmo dalam (Hastuti, 2017) ada 9 indikator/elemen penyelenggaraan *good government governance* meliputi:

1) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi masyarakat secara aktif baik secara langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan rakyat. Pada saat proses pengambilan keputusan, setiap warga negara mempunyai hak suara yang sepadan. Kebebasan berserikat, berpendapat, dan terlibat secara konstruktif merupakan dasar pembentukan partisipasi masyarakat (Alhidayat, 2019).

2) Kerangka Hukum (*Rule of Law*)

Keberadaan penyelenggaraan hukum yang diberlakukan adil. Kerangka hukum serta perundang-undangan yang berlaku dapat ditegakkan dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara.

3) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibuat berdasarkan kebebasan dalam mengakses informasi. Informasi mengenai kepentingan publik harus dapat diperoleh secara bebas dan disajikan secara memadai dan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Alhidayat, 2019).

4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Pemerintah harus responsif dalam melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Kegiatan pelayanan publik yang diberikan harus sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka hal tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab lembaga untuk mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik (Alhidayat, 2019).

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintah harus berfokus pada kepentingan publik secara menyeluruh. *Good governance* berperan sebagai mediator (penengah) bagi kepentingan masyarakat yang beragam untuk mencari kesepakatan (*Consensus*) terbaik untuk masing-masing pihak (Alhidayat, 2019). Hal ini juga dapat diterapkan pada berbagai kebijakan dan peraturan yang telah dan akan diterapkan pemerintah untuk masyarakat.

6) Berkeadilan (*Equity*)

Setiap warga negara memiliki kesempatan dan porsi yang setara dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan atau dalam memelihara dan memajukan kualitas hidup.

7) Efektifitas dan Efisiensi (*Efficiency & Effectiveness*)

Dalam mengelola sumber daya publik, pemerintah harus berlandaskan pada kebutuhan dan mengelola sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Bentuk kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap kesuksesan dan kegagalan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat.

9) Visi Strategis (*Strategic vision*)

Warga negara dan pemerintah mempunyai pandangan komprehensif dan berjangka panjang terkait pelaksanaan tata pemerintah berkualitas tinggi.

Namun, dari kesembilan indikator/elemen di atas terdapat tiga pilar atau elemen utama yang mempunyai keterkaitan dalam mengaktualisasikan *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Zeyn, 2011).

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Dalam SAP No. 71 tahun 2010, PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan pasal 9, menerangkan:

“Laporan keuangan merupakan organisasi yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Selanjutnya, Rasdianto dalam (Ansar, 2018) LKPD merupakan hasil dari proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) suatu entitas akuntansi di suatu pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan keuangan entitas akuntansi tersebut serta sebagai informasi bagi pihak terkait untuk digunakan pada proses penentuan keputusan ekonomi.

Berdasarkan kerangka konseptual pada PP No.71 Th. 2010 (ayat 24) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah menyiapkan laporan keuangan untuk pemerintah daerah. Hal ini bertujuan menyediakan informasi relevan mengenai keuangan pada suatu entitas akuntansi (Hastuti, 2017).

2.1.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam merealisasikan laporan keuangan yang berkualitas diterapkan standar normatif (Susanti & Andayani, 2017). Ada empat karakteristik laporan keuangan sesuai PP No. 71 Th. 2010, yakni:

1) Relevan

Relevansi laporan keuangan dilihat dari substansi informasi yang disajikan, informasi wajib membantu pengguna membuat keputusan dengan mempertimbangkan kejadian masa lampau atau sekarang, meramalkan masa depan, dan memperbaiki hasil evaluasi sebelumnya. Relevansi informasi mempunyai ciri-ciri,

a. Terdapat manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Pengguna informasi dimungkinkan menggunakan informasi yang disediakan untuk perbaikan harapan pada masa yang telah berlalu.

b. Terdapat manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Pengguna informasi mampu memproyeksikan peristiwa masa depan melalui informasi di waktu lampau dan waktu sekarang.

c. Tepat waktu

Penyediaan informasi sesuai ketentuan waktu memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Penyajian informasi secara lengkap dan melingkupi keseluruhan bentuk informasi akuntansi memiliki potensi dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan. Tiap butir informasi dijelaskan secara menyeluruh sehingga kekeliruan dalam pengaplikasian informasi bisa dihindari dalam laporan keuangan.

2) Andal

Laporan keuangan memuat informasi yang bebas penafsiran keliru dan/atau kesalahan materil, tiap-tiap peristiwa disajikan secara benar dan dapat terverifikasi. Relevansi informasi yang tidak didukung penyajian andal tetap memiliki potensi penyesatan dalam penggunaan informasi. Informasi yang andal mempunyai kriteria, dibawah ini:

a. Penyajian Jujur

Penyajian informasi mengungkapkan setiap transaksi atau kejadian lainnya sesuai dengan realitanya secara jujur.

b. Dapat diverifikasi (*Verifiability*)

Setiap informasi dapat diverifikasi kebenarannya meskipun diverifikasi oleh pihak yang berbeda.

c. Netralitas

Tidak adanya keberpihakan atau keuntungan sepihak dalam informasi laporan keuangan karena ditujukan untuk kebutuhan publik.

3) Dapat dibandingkan

Informasi pada laporan keuangan dapat lebih bermanfaat jika laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan dari entitas lain yang sejenis. Perbandingan laporan keuangan melalui dua cara, yaitu internal dan eksternal. Pada perbandingan internal diadakan jika suatu entitas pada setiap tahunnya memberlakukan kebijakan

akuntansi yang serupa. Sementara itu, perbandingan eksternal diadakan jika suatu entitas memberlakukan kebijakan akuntansi yang serupa. Jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, perubahan yang ada dimasukkan di periode diadakannya perubahan.

4) Dapat dipahami

Penyajian informasi pada laporan keuangan diungkapkan melalui bentuk atau istilah yang sesuai pemahaman pengguna sehingga laporan keuangan mudah dipahami. Karenanya, pengguna informasi dianggap mempunyai wawasan yang cukup terkait kegiatan dan lingkungan operasi dari suatu entitas, serta terdapat keinginan pengguna informasi dalam mencari tahu maksud dari informasi tersebut.

Berdasarkan beberapa karakteristik di atas, suatu laporan keuangan dikatakan mempunyai kualitas yang baik jika informasi yang disediakan dapat dipahami, andal, dan mampu dimanfaatkan pada proses penentuan keputusan (Ningrum, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibawah ini menganalisis terkait dengan pengaruh SPIP dan *good government governance* terhadap kualitas LKPD.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, Nanang Wijaya (2016)	Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> (GGG) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Jawa Barat dan Banten).	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan <i>Good Government Governance</i> berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sedangkan, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
2.	Hastuti, Hilda Sari (2017)	Pengaruh <i>Good Governance</i> , Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPKAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governnace</i> secara partial tidak berpengaruh substansial terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, SAP dan sistem pengendalian intern secara partial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan

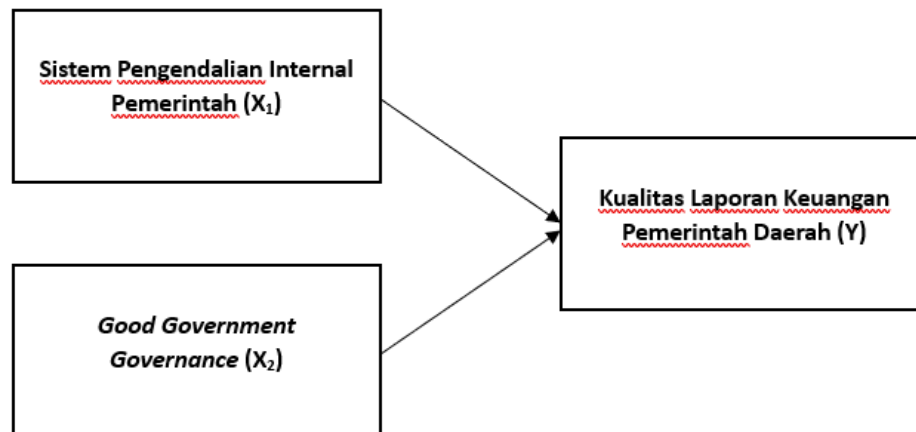
		Kabupaten Ogan Ilir).	keuangan. Namun secara simultan <i>good governance</i> , SAP dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3.	Ningrum, Widya Mutiara (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD di Kota dan Kabupaten Magelang).	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas LKPD.
4.	S, Alhidayat (2019)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar	Hasil dari pengujian variabel dapat dilihat bahwa variabel <i>good governance</i> secara partial

		Akuntansi Pemerintah (PSAP 01) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD di Kabupaten Enrekang.	berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD dan untuk variabel SAP secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, secara simultan variabel <i>good governance</i> dan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Enrekang.
5.	Putra, Aldy Pratama (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kota Pekanbaru.	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Pekanbaru, terdapat pengaruh dari penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Pekanbaru, dan terdapat pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Pekanbaru.
6.	Rukmi Juwita,	Pengaruh Standar	Berdasarkan hasil pengujian

	Elsa Prajameta (2022)	Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap <i>Good Government Governance</i> di Direktorat Metrologi Bandung.	dapat diketahui bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara SAP dan sistem pengendalian internal terhadap <i>good government governance</i> di Direktorat Metrologi Bandung. Sedangkan, secara simultan juga tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara SAP dan sistem pengendalian internal terhadap <i>good government governance</i> di Direktorat Metrologi Bandung.
--	--------------------------	---	---

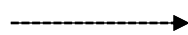
2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah komponen yang berpengaruh signifikan pada suatu penelitian yang memiliki tujuan dalam menjelaskan objek yang ingin diteliti secara tepat dan menggambarkan yang jelas dan sistematis terkait objek yang akan diteliti. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar suatu variabel independen (bebas) yakni, penerapan SPIP dan *good government governance* dapat memengaruhi suatu variabel dependen (terikat), dalam hal ini yakni kualitas LKPD Kabupaten Maros. Adapun dibawah ini adalah gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini,



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:



: Pengaruh variabel X (SPIP dan *good government governance*) terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros).

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2015) mengungkapkan Hipotesis adalah tanggapan sementara terkait bagaimana suatu permasalahan yang dirumuskan dalam suatu penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut digambarkan melalui rangkaian pertanyaan. Akibatnya, hipotesis ini hanyalah solusi jangka pendek yang perlu diverifikasi berdasarkan studi yang dilakukan untuk menyederhanakan analisis masalah. Hipotesis penelitian berikut dapat diturunkan dari pernyataan topik, studi teoritis, penelitian sebelumnya yang relevan, dan kerangka konseptual yang disajikan sebelumnya.

1. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses yang dilaksanakan guna memastikan tingkat keandalan dan ketelitian informasi keuangan pemerintah, efektifitas dan efisiensi operasional pemerintah, serta kepatuhan terhadap peraturan maupun hukum yang berlaku dan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ningrum, 2019).

Penerapan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah dapat meningkatkan keandalan, keobjektifan, dan mencegah terjadinya ketidakkonsistenan informasi keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah akan dapat mendorong terbentuknya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2022) dan (Tullah et al., 2016) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₁: Penerapan SPIP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Good Government Governance diterapkan melalui pelaksanaan pengelolaan pemerintah yang baik, dengan menerapkan prinsip partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab agar semua sumber daya yang dimiliki daerah dikelola dengan baik dan tepat untuk mencapai tujuan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah menjadi patokan tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan pemerintahan

yang baik juga mendukung dalam ketercapaian karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah dengan memenuhi berbagai kualitas yang diharapkan (Hastuti, 2017).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Masitoh et al., 2020) yang membuktikan bahwa *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂: *Good government governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.